

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan pertumbuhan perekonomian dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pertumbuhan perekonomian merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan perekonomian tersebut harus diikuti dengan seberapa baik pendistribusian pendapatan nasional ataupun regional terhadap warnanya.

Besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak bisa memberikan gambaran bahwa seluruh penduduk yang berada di wilayah tersebut meningkat kesejahteraannya. Sangat mungkin terjadi, apabila ekonomi pertumbuhan meningkat pesat tetapi jumlah masyarakat miskin juga meningkat. Hal tersebut tergantung pada tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Jika pemerataannya kurang baik, maka pertumbuhan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu ataupun hanya kelompok orang yang berpenghasilan tinggi saja. Namun, jika distribusinya baik, maka pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh penduduk pada umumnya. Sehingga masyarakat umum mendapatkan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan akan berkurang.

Dari segi prestasi sebenarnya upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tekanan kemiskinan cukup berhasil. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia berhasil diperbaiki secara cukup inpresif selama dua setengah dekade (1970-1995) statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia (BPS 2000) berhasil diturunkan dari 54,2 juta orang atau 40,1 % dari total penduduk pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta orang atau 11,3 juta % pada tahun 1996. Namun, usaha Indonesia tersebut terpengaruhi oleh kejadian pada akhir dekade tahun 1990-an, krisis terjadi secara tidak terduga dan diluar perkiraan dimana puncak krisis tersebut terjadi antara tahun 1997 dan 1998, yang merupakan pukulan yang sangat berat bagi pembangunan Indonesia. Bagi kebanyakan orang, dampak dari krisis yang terparah dan langsung dirasakan, diakibatkan oleh inflasi. Antara tahun 1997 dan 1998 inflasi meningkat dari 6% menjadi 78%, sementara upah riil turun menjadi hanya sekitar sepertiga dari nilai sebelumnya. Akibatnya, kemiskinan meningkat tajam. Antara tahun 1996 dan 1999 proporsi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah dari 18% menjadi 24% dari jumlah penduduk. Pada saat yang sama, kondisi kemiskinan menjadi semakin parah, karena pendapatan kaum miskin secara keseluruhan menurun jauh di bawah garis kemiskinan.

Jika keadaan di atas tidak segera diatasi, maka akan semakin banyak jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang mengakibatkan tingkat nutrisi dan gizi masyarakat rendah, tingkat pendidikan yang dapat dicapai rendah. Pada kelanjutannya menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki dan rendahnya angka harapan hidup (*life expectancy*).

Upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin telah dilakukan sejak era pembangunan 5 tahun. Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan adalah dengan mengetahui keberadaan penduduk miskin di setiap kabupaten di seluruh propinsi. Dengan mengetahui lokasi mereka, diharapkan pembangunan dapat dirumuskan lebih cepat dan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pusat pembangunan ekonomi nasional di mulai dari Pulau Jawa dengan alasan bahwa semua fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti transportasi, telekomunikasi, dan infrastruktur lainnya lebih tersedia di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Pembangunan saat itu juga hanya terpusatkan pada sektor-sektor tertentu saja yang secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menyumbang nilai pendapatan nasional yang tinggi. Pemerintah saat itu percaya bahwa nantinya hasil dari pembangunan itu akan mempengaruhi ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya. Namun, yang terjadi kesenjangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi merupakan masalah besar di banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Barat yang merupakan pusat pembangunan sejak orde baru. Hingga pada tahun 2004 dibuat UU RI No 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana peran pemerintah sangat dominan dalam menentukan kebijakan daerahnya sehingga dapat mengoptimalkan potensi daerahnya. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah di kalangan penduduknya. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya kesenjangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi

sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang dampaknya cukup merugikan di Jawa Barat.

Distribusi pendapatan dapat disebut sebagai pembagian pendapatan yang menggambarkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi dan juga menggambarkan variabilitas atau dispersi (penyebaran) pendapatan. Berikut ini data kesenjangan pendapatan antardaerah di Jawa Barat menggunakan indikator indeks theil selama dua puluh lima tahun yang memberikan suatu gambaran yang cukup jelas mengenai tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antardaerah di Provinsi Jawa Barat sehingga dapat dijadikan salah satu alasan penelitian ini lakukan.

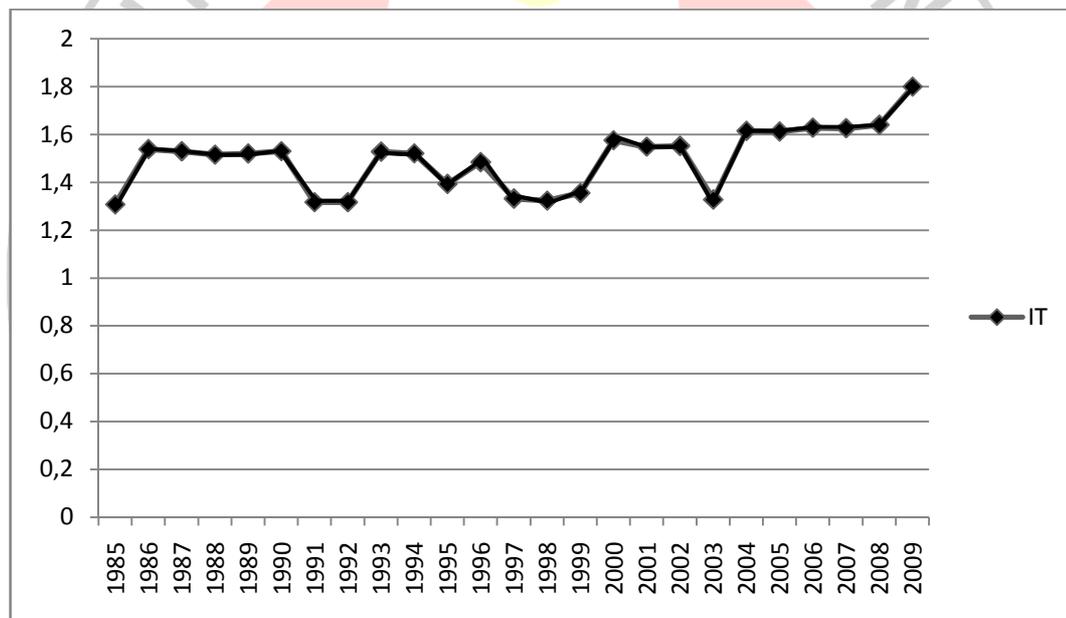
**Tabel 1.1**  
**Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antardaerah di Jawa Barat**  
**Periode Tahun 1985-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Theil</b>	<b>Tahun</b>	<b>Indeks Theil</b>
1985	1,307	1998	1,323
1986	1,538	1999	1,354
1987	1,529	2000	1,575
1988	1,515	2001	1,548
1989	1,520	2002	1,551
1990	1,530	2003	1,327
1991	1,316	2004	1,614
1992	1,316	2005	1,611
1993	1,527	2006	1,627
1994	1,520	2007	1,625
1995	1,392	2008	1,639
1996	1,483	2009	1,799
1997	1,331	<b>Rata-rata</b>	<b>1,497</b>

*Sumber: BPS diolah dari perhitungan*

Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata kesenjangan distribusi pendapatan antardaerah Jawa Barat periode 1985-2009 sebesar 1,497. Hal ini berarti bahwa di

Jawa Barat telah terjadi kesenjangan distribusi pendapatan antar daerah pada tingkat level yang tinggi, hal ini ditunjukkan dengan besarnya Indeks Theil (IT) yang rata-rata di atas 1,5. Hal ini sesuai dengan indikator indeks theil bahwa nilai indek theil 0 (nol) maka pemerataan sempurna dan bila nilai indeks theil semakin jauh dari 0 (nol) maka kesenjangannya semakin besar dan menandakan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan antardaerah yang terjadi di Jawa Barat cukup serius dan dikhawatirkan berimbas pada proses pembangunan yang tengah dijalankan.



**Grafik 1.1**  
**Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antardaerah di Jawa Barat**  
**Periode Tahun 1985-2009**

Berdasarkan grafik 1.1 di atas dapat diketahui perubahan ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan indeks theil yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Arndt (1987:11) distribusi pendapatan di suatu negara adalah hasil dari berbagai macam faktor ekonomi, sosial, institusional dan politik.

Salah satu penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah ketidakseimbangan regional dalam kepadatan penduduk, pendapatan per kapita dan pembangunan antardaerah di suatu provinsi. Kesenjangan yang terjadi pada periode 1985-1999 memberikan sebuah gambaran adanya suatu perbaikan, ini ditandai dengan penurunan ketika menginjak kepada tahun 90-an. Itu dikarenakan adanya PDRB Perkapita yang merata di setiap daerah di Jawa Barat. Pada periode 2000-2009 rata-rata angka indeks theil menunjukkan begitu tinggi, di atas 1,5. Pada periode ini kesenjangan antar wilayah terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 1,327. Hal ini disebabkan pendapatan perkapita antardaerah Jawa Barat cukup besar yaitu Rp. 3.126.803 dengan jumlah penduduk tidak begitu tinggi yaitu berjumlah 28.595.004 jiwa. Kemudian angka indeks tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 1,798. Hal itu disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk dan tidak meratanya PDRB Perkapita di setiap daerah sehingga mempengaruhi PDRB Perkapita Jawa Barat tahun 2009. Tabel 1.2 memperjelas penyebab kenapa kesenjangan distribusi pendapatan Jawa Barat pada tahun 2009 begitu tinggi.

Kesenjangan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang dijelaskan kembali oleh Irma dan Cynthia Taft Morris (Lincoln Arsyad 1997: 67), yaitu penambahan penduduk, inflasi, ketidakmerataan pembangunan antardaerah, investasi, rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijakan industri, substitusi impor, memburuknya nilai tukar, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita, Indeks Theil di Jawa Barat pada**  
**Tahun 2009**

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk (orang)	PDRB Perkapita (rupiah)	Indeks Theil
1	Kab Bogor	4453927	6351300	1.186
2	Kab Sukabumi	2293742	3259200	0.621
3	Kab Cianjur	2189328	3481030	0.633
4	Kab Bandung	3148951	4246960	1.232
5	Kab Garut	2504237	4296630	0.741
6	KabTasikmalaya	1860157	3481500	0.482
7	Kab Ciamis	1615759	4308950	0.903
8	Kab Kuningan	1173528	3492870	0.667
9	Kab Cirebon	2211186	3401200	0.601
10	Kab Majalengka	1219145	3376810	0.726
11	Kab Sumedang	1143992	4765340	1.097
12	Kab Indramayu	1827878	4032530	1.761
13	Kab Subang	1486412	4210010	1.039
14	Kab Purwakarta	819005	7912120	2.443
15	Kab Karawang	21344389	8113110	1.056
16	Kab Bekasi	2121122	20701930	7.368
17	Kota Bogor	895596	4867350	1.276
18	KotaSukabumi	311559	6090190	1.923
19	Kota Bandung	2414704	11690810	2.979
20	Kota Cirebon	304152	19905550	8.302
21	Kota Bekasi	2176743	6184520	1.442
22	Kota Depok	1465826	3850650	0.877
23	Kota Cimahi	547862	10855030	3.806
24	Kota Tasikmalaya	640324	3941890	1.624
25	Kota Banjar	185993	4011890	1.292

Sumber: BPS (beberapa edisi)

Gambaran di atas menunjukkan betapa kesenjangan pendapatan di Jawa Barat terjadi begitu nyata. Hal itu terlihat dari indeks theil yang berbeda disetiap daerah. Kota yang mengalami kesenjangan distribusi pendapatan yang tinggi diantaranya pada kota Cirebon tahun 2009 kesenjangan distribusi pendapatan

sangat tinggi mencapai 8.302 dan pada kota Bekasi kesenjangan distribusi pendapatan mencapai 7.368. Hal tersebut dikarenakan kedua kota tersebut adalah pusat industri terbesar di Jawa Barat sehingga pendapatan masyarakat golongan rendah dan tinggi sangat berbeda dan mempengaruhi jumlah perolehan PDRB Perkapita kota tersebut yang didominasi oleh golongan masyarakat tinggi. Tentu harus ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi masalah tersebut mengingat dampak yang ditimbulkan begitu besar.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk masalah tersebut dan mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh PDRB Perkapita, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan Antardaerah Di Jawa Barat Periode 1985-2009.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Perkapita terhadap kesenjangan distribusi pendapatan antardaerah di Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap kesenjangan distribusi pendapatan antardaerah di Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap kesenjangan distribusi pendapatan antardaerah di Jawa Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Perkapita terhadap kesenjangan distribusi pendapatan antardaerah di Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap kesenjangan distribusi pendapatan antardaerah di Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap kesenjangan distribusi pendapatan antardaerah di Jawa Barat.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan secara teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi tambahan bagi para mahasiswa dan masyarakat untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai ketimpangan distribusi pendapatan.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk bahan informasi bagi pemerintahan daerah Jawa Barat sebagai acuan atau bahan untuk menentukan kebijakan dalam pengentasan kesenjangan distribusi pendapatan dan juga bagi provinsi atau daerah lainnya.